BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Anggaran

Menurut Brownell dalam Sardjito dan Muthaher (2008:38) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penetuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Partisipasi anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti 2010:69).

Menurut Riyadi dalam Keni dan Dewi (2008:172) partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh para manajer dalam proses penyusunan anggaran. Sementara Siegel dan Marconi dalam Keni dan Dewi (2008:172) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai keterlibatan manajer-manajer bertanggungjawab yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.

2.1.1.1 Manfaat Partisipasi Anggaran

Didalam suatu perusahaan partisipasi anggaran mempunyai manfaat, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk pegawainya. Manfaat partisipasi anggaran menurut A.Ikhsan dan M.Ishak (2005:175) sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkat manajemen,
2. Meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cendrung untuk meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok dalm penetapan tujuan,
3. Menurunkan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran
4. Menurunkan ketidak adilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antar subunit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.

2.1.1.2 Indikator Partisipasi Anggaran

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyrakat. Dalam partisipasi penyusunan angggaran berpengaruh terhadap banyak faktor seperti motivasi, kinerja, kepuasan kerja. Terdapat beberapa indikator partisipasi anggaran (Brownell dalam Falikhatun:2007) adalah:

1. Keterlibatan
2. Pengaruh
3. Komitmen

Indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterlibatan

   Keuangan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD, dengan tahapan penyusunan rencana kerja anggaran dan persetujuan raperda APBD, proses penyusunan APBD ini melibatkan partisipasi setiap pegawai mulai dari level kasubag hingga kepala dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara tidak langsung berdampak pada etika dalam bekerja yaitu tangungjawab dalam anggaran (Siti Musyarofah; 2006:49).

2. Pengaruh

   Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell dalam Fitri; 2004:234).

3. Komitmen

   Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan kinerja dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap *budget* (Murray; 1990:104-123).

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dalam Abdul Hafis Tanjung (2006:35) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang memerlukan.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut mendagri Nomor 29 Tahun 2002 (pasal 70:ayat 1), tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi "Sistem akauntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi".

Sedangkan dalam kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 (pasal 23: ayat 1) menjelaskan bahwa "Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling

berhubungan, disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.2.2 Indikator Sistem Akuntansi keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Antara lain:

1. Pencatatan
2. Penggolongan dan pengikthisaran
3. Pelaporan

Indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannnya. Pihak-pihak yang memerlukannnya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006: 274) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:p570) kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.

Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000:164) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Barnaden dan Russel dalam Gomes, Faustino Cardoso (2000:162) mendefinisikan kinerja sebagai catatan *outcome* yang dihasilkan suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu

Menurut pengertian diatas maka dapat di simpulkan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan secara kualitas dan kuantitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan misi organisasi selama suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Pengukuran kinerja (Indra Bastian 2006:275) sebagai berikut:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta malakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

2.1.3.3 Indikator kinerja

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Menurut Indra Bastian (2006:267) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Input)*

   Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator keluaran *(Output)*

   Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

3. Indikator hasil (*Outcomes)*

   Indokator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

4. Indikator manfaat (*Benefits*)

   Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (*Impacts*)

   Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

5.1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga originalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka akan dijabarkan beberapa persamaan dan perbedaan dari peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Penulis, Sumber, Tahun, Asal Universitas	Judul	Pesamaan	Perbedaan	Hasil
1	Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher/Universitas Islam Sultan Agung Semarang	PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: BUDAYA DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING	(1) Partisipasi Penysunan Anggaran (2) Kinerja	Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating	Bardasarkan hasil penelitian yang telah dianalisi dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
2	Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari/Universitas Siliwangi/2009	PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN OELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	(1)Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (2)Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Intern	Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
3	Malcom J Prowler, Donald Harradine and Roger Latham/2009	STATUTORYFINANCIAL ACCOUNTING IN THE UK PUBLIC SECTOR	Financial accounting		*Organisation produced much simplerets of accounting, be found there is a significant influence on the performance of the financial accounting*
4	Maria A. Leach-Lopez, William W. Stammerjohan, and Kyoo Sang Lee/2007	BUDGET PARTICIPATION AND JOB PERFORMANCE OF SOUTH KOREAN MANAGERS MEDIATED BY JOB SATISFACTION AND JOB RELEVANT INFORMATION	Budget Participation		*The primari findings of this study are that while there are string impact between budget participation and performance among all of our South Korean managers, be found the influance of budgetary participation on performance significant*
5	Abdul Rohman/Universitas Diponegoro/2009	PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI,	(1)Sistem Akuntansi Keuangan	(1)pengelolaan keuangan daerah	Implementasi sistem akuntansi pemerintah, implementasi

		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (SURVEI PADA PEMDA DIJAWA TENGAH)	Daerah (2)Kinerja Pemerintah Daerah	(2)Fungsi Pengawasaan	keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda
6	Nur Faizzah dan Titik Mildawati/ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya/2007	PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN VARIABEL PEMODERASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PEMKOT SURABAYA	Kinerja	(1)Parisipasi penyusunan anggaran (2)Variabel Pemoderasi gaya kepemimpinan (3)Komiimen organisasi	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja manajerial
7	Askam Tuasikal/Universitas Pattimura Ambon/2008	PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DIPROVINSI MALUKU)	(1) Sistem akuntansi keuangan (2)Kinerja	Pengelolaan keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah

5.2 Kerangka Pemikiran

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer (baik kasubag sampai dengan kabag) dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para kabag/kasubag untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para kabag/kasubag akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai

sasaran/target yang telah ditetapkan dalam anggaran (Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher:2008).

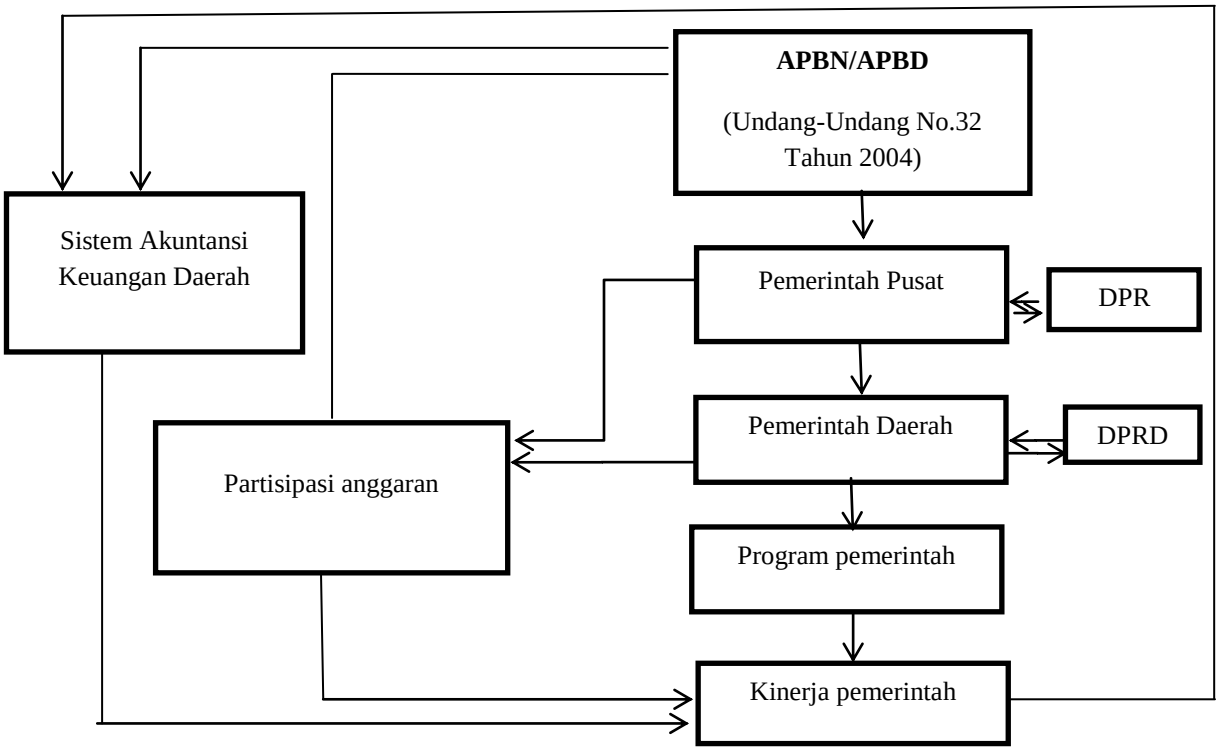
Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah memerlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan. Sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja pemerintah itu sendiri, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam mengahasilkan pelayanan publik yang baik (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Setiap organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *comparability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang sangat penting (Lin dalam Askam Tuasikal:2008).

Setiap orgainsasi memerlukan sistema pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintahan daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintahan merupakan hal yang sangat vital karena

peningkatan kualitas dan *comparability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang sangat penting (Lia dalam Askm Tuasikal:2008).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

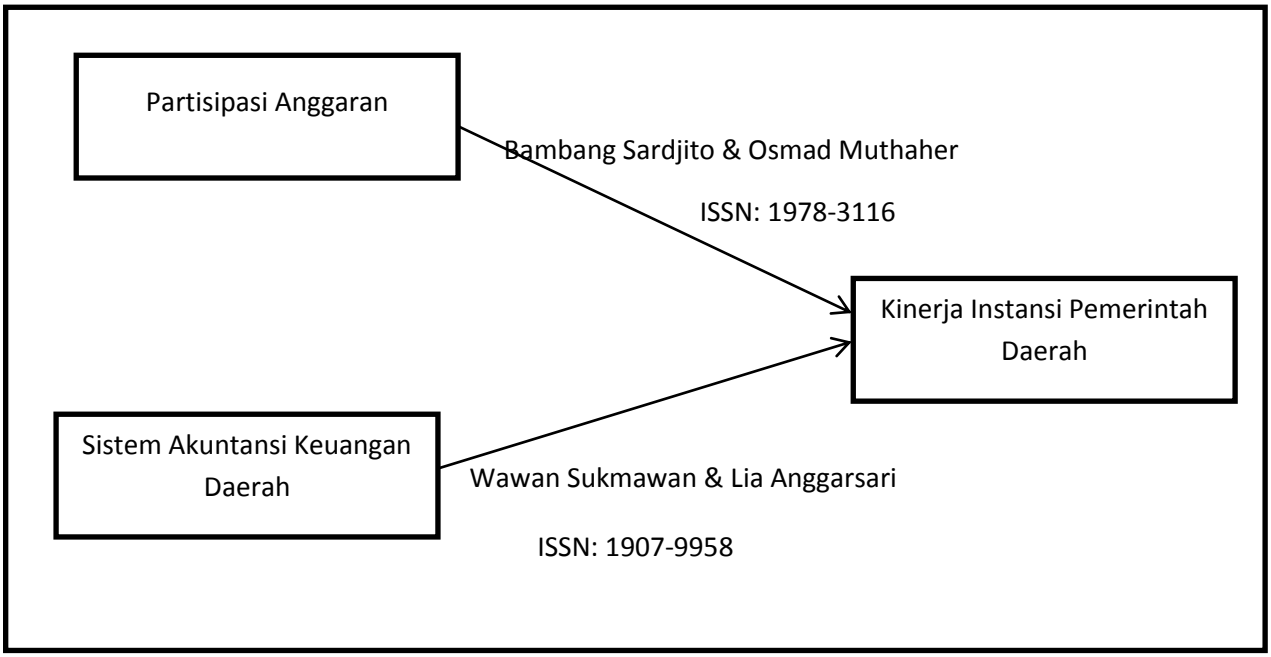
2.2.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2008) dalam jurnalnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran akan semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari (2009) dalam jurnal nya mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengaruh antar variabel tersebut maka penulis dapat memetakan paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 2.2
Skema Paradigma Penelitian.

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) hipotesisi adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

H_1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

H_2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah